

Persepsi Guru dan Orang Tua dalam Mengelola Kelas Inklusif Anak Berkebutuhan Khusus Di SD 12 Prafi

Dian Indriyani ^{*1}, Zaki Mubarak ², Elvi Rahmi ³, Juni Saputra ⁴, Ainul Yaqinah ⁵

Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia ^{1,2,3,4,5}

STKIP Muhammadiyah Manokwari ^{1,2,3,4,5}

dindriyani413@gmail.com, zakimubarak476@gmail.com, elvirasamad@gmail.com,
junisyaputra@umpb.ac.id, ainulyaqinah23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Guru dan orang tua terhadap implemetasi pendidikan inklusif Sekolah Dasar Inpress 12 Prafi Manokwari, Papua Barat. beberapa tantangan yang dihadapi: 1) tantangan sosial emosional; 2) tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan; 3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional (guru) 4) keterbatasan sarana dan prasarana, 5) Beban administrasi dan modifikasi kurikulum, 6) Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebagai solusinya adalah 1) Peningkatan kualitas in-service training (INSET) berupa awareness programmes, school-based professional development programmes, family support; 2) Pelatihan co-teaching, yaitu guru dapat berbagi informasi mengenai pembelajaran dengan dengan siswa di kelas, mengurangi beban guru di kelas karena pembelajaran dilakukan oleh dua guru, dan memberikan pengalaman lebih dalam mengajar. Jika guru yang mengajar dapat bekerjasama dengan baik, maka beban mengajar yang dirasakan akan berkurang 3) Perlunya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua.

Kata Kunci: Persepsi Guru, Orang Tua, Mengelola Kelas Inklusif, Sekolah Dasar

Abstract

This study aims to determine the perceptions of teachers and parents towards the implementation of inclusive education at Inpress 12 Primary School Prafi Manokwari, West Papua. some of the challenges faced: 1) socio-emotional challenges; 2) challenges related to learning and skill development; 3) challenges related to the preparation and training of professionals (teachers) 4) limited facilities and infrastructure, 5) administrative burdens and curriculum modifications, 6) low awareness of parents and the community towards children with special needs. The solutions are 1) Improving the quality of in-service training (INSET) in the form of awareness programmes, school-based professional development programmes, family support; 2) Co-teaching training, where teachers can share information about learning with students in the classroom, reduce the burden on teachers in the classroom because learning is done by two teachers, and provide more experience in teaching. If the teachers can cooperate well, then the perceived teaching burden will be reduced 3) The need for collaboration between the school and parents.

Keywords: Perceptions of Teachers, Parents, Managing Inclusive Classrooms, Elementary School

PENDAHULUAN

Pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Secara legal dapat dilihat bahwa pelaksanaan pendidikan memiliki keinginan yang kuat untuk dapat dilaksanakan secara adil dan menyeluruh tanpa adanya pengelompokan yang

berdasarkan kekurangan yang dimilikinya. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat disabilitas juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Sunaryo, 2009:1).

Dalam konteks yang lebih luas, Sebagai bentuk reformasi pendidikan yang dapat diartikan sebagai sikap anti-diskriminasi, perjuangan untuk kesetaraan dan peluang, perjuangan untuk keadilan, peningkatan akses ke semua pendidikan, peningkatan dalam kualitas pendidikan, akhir pendidikan wajib, dan peningkatan dalam upaya untuk berpartisipasi dalam komunitas dengan kebutuhan khusus. Di Indonesia pendidikan inklusif telah mulai dilaksanakan di sekolah tertentu. Hal ini sesuai dengan adanya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen no 380/C.66/MN/ 2003 tentang pendirian pendidikan inklusi di tingkat kabupaten/ kota. Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (*special education*). Yang mendasari pendidikan inklusif adalah pendidikan khusus (*special education*). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus

Yang menjadi dasar konsep pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua (*education for all*) dinyatakan bahwa Inklusi dipandang sebagai proses menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa itu adalah tanggung jawab semua untuk mendidik anak. Pendidikan inklusif bagian program pendidikan untuk semua (*education for all*), Dan konsep tentang perbaikan sekolah (*schools improvement*), Unesco (2005:13).

Sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pemahaman tentang pendidikan inklusi itu tampaknya belum bisa dijadikan patokan, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan tentang konsep pendidikan inklusi. Sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti seberapa besar persepsi positif ataupun negatif orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah. Sikap adalah sebuah disposisi dalam merespon baik setuju maupun tidak setuju terhadap obyek, orang, institusi, maupun peristiwa. Karakteristik atribut dari sikap adalah fungsinya yang evaluatif seperti pro-kontra, suka tidak suka, dan lain sebagainya (Ajzen, 2005) Respon orang tua dan guru terhadap pendidikan inklusi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak usia dini, apalagi yang berkebutuhan khusus. Respon tersebut justru dapat di manfaatkan untuk meningkatkan partisipasi orang

tua dalam pembelajaran. Hasil penelitian Dyah Galuh dkk (2013) menyatakan bahwa partisipasi orang tua dalam aktivitas belajar anak berbasis minat dapat berjalan dengan baik di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap guru dan orang tua terhadap pendidikan inklusi di sekolah dasar. Sikap guru dan orang tua terhadap pendidikan inklusi dan penerapannya dapat didefinisikan sebagai disposisi dalam merespon setuju atau tidak setuju, positif (pro) atau negatif (kontra) terhadap penerapan prinsip dan program inklusi di sekolah. Karena Peran guru dan orang tua sangat penting dalam pembentukan pola pikir siswa disekolahnya, dan tujuan penelitian.

METODE

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap bukubuku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, Nazir (2003: 111). Peneliti melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari: buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi). Sehingga dalam penelitian ini meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Inklusi di Sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan isi pada pasal 5, menyebutkan bahwa anak luar biasa mempunyai hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka, serta mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya pada ayat 2, 3, dan 4 menegaskan bahwa anak luar biasa, berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Anak luar biasa disini bukan saja mereka yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, dan intelektual saja, melainkan mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Selain itu tercantum pada Deklarasi Umum Hak-Hak Kemanusiaan 1948 (*The 1948 Universal Declaration of Human Right*), kemudian diperbarui pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Tahun 1990 (*The 1990 World Conference on Education for All*), dan Konferensi Dunia (1994) komitmen tentang Education for All (EFA), bertujuan untuk meyakinkan bahwa hak tersebut adalah untuk semua, terlepas dari perbedaan yang dimiliki oleh individu.

Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia, dilatar belakangi oleh hak anak untuk memperoleh pendidikan. Setiap makhluk mempunyai kebutuhan. Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai derajat tertinggi di antara makhluk lainnya, manusia mempunyai kebutuhan yang paling banyak dan kompleks. Kebutuhan manusia secara

umum mencakup kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan sosial emosional, dan kebutuhan pendidikan (Wardani, 2011: 1). Tidak berbeda dengan orang-orang normal, anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kebutuhan yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya.

Stakeholder dan guru wajib memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengaktualisasikan diri melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak terbatas di sekolah luar biasa, tetapi juga pendidikan yang terintegrasi, yang memungkinkan anak luar biasa belajar bersama dengan anak normal. Sistem pendidikan seperti ini disebut dengan pendidikan inklusi. Di Indonesia, implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Sekolah inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anakanak normal di sekolah reguler (Tarmasyah) 2007; Loiacono dan Valenti, 2010). Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus pula. Dengan adanya sekolah inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler layaknya anak normal. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain (Delfi, 2006)

Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Kehadiran sekolah inklusi merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat, yaitu anak berkebutuhan khusus harus sekolah di sekolah khusus pula. Dengan adanya sekolah inklusi anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler layaknya anak normal. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan Pendidikan khusus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya, dengan kata lain mereka tidak mampu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi maupun fisik, yang termasuk kategori ABK antara lain: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, kesulitan belajar, dan kesulitan berperilaku, hambatan komunikasi. Interaksi antara siswa ABK dan guru memerlukan cara komunikasi dengan terus menerus dimana didalamnya terselip sebuah proses memotivasi satu

sama lain. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain (Mulyono, 1999).

Kelebihan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Terlepas dari kenyataan bahwa model inklusi merupakan sekolah yang konsisten dengan gagasan keadilan sosial yang mendukung prinsip normalitas, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari sekolah inklusi ini. Sekolah inklusi dianggap dapat memberi berbagai manfaat baik masyarakat umum maupun bagi anak luar biasa sendiri. Masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak luar biasa. Selain itu di sekolah inklusi juga memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal (IG.A.K. Wardani, 2011:1).

Perilaku tersebut memberikan dampak pada psikologis anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus (*self esteem*). *Self esteem* merupakan bagian dari *self concept* atau konsep diri. Memberikan makna perasaan seseorang tentang ketidaksesuaian antara dirinya dan ingin menjadi apa nantinya. Pendapat lain adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri baik itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Anak yang memiliki *self esteem* yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Dan berlaku sebaliknya, anak yang memiliki *self esteem* yang rendah, merasa dirinya kurang berharga hal ini mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri (Wilson, dkk, 2011).

Watkins, (2005) *self esteem* memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan merasa lebih dihormati, sehingga mampu mengembangkan potensi disertai mencapai keberhasilan berdasarkan kekuatannya. Pendapat lain setuju bahwa menempatkan anak dengan kebutuhan khusus juga baik bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka (Irvine dan Lupart 2006).

Kompetensi sosial dikembangkan dengan cara anak berkebutuhan khusus belajar berinteraksi dengan orang yang normal. Peserta didik ditunjukkan situasi hidup yang nyata di dalam kelas (Wilson, Ellerbe, dan Christian, 2011). Interaksi sosial mengajarkan peserta didik untuk meniru strategi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, memperoleh kecakapan hidup yang lebih baik, dan mengurangi perilaku yang meledak-ledak (Irvine dan Lupart, 2006).

Penyelenggaraan Sekolah Inklusi, Tantangan dan Strategi implementasinya

Beberapa tantangan yang dihadapi penyelenggara Pendidikan inklusi di antaranya 1) tantangan sosial emosional; 2) tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan; 3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam setting inklusif 4) keterbatasan sarana dan prasarana. Penyelenggaraan sekolah inklusi memang membutuhkan sarana dan prasarana

yang banyak, karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku braile untuk anak tuna netra, dan sebagainya (Yusraini, 2013). Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya; 5) Beban administrasi dan modifikasi kurikulum. Seorang guru hendaknya mengetahui program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Pola pembelajarannya harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, biasa disebut dengan *Individualized Educational Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI), perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidik harus memiliki kemampuan khusus. Pada kenyataannya hasil monitoring sekolah inklusi yang dilakukan oleh Direktorat PSLB menemukan bahwa sebagian besar guru sekolah inklusi mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non akademik (Sutji Harijanto, 2011). Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Selain itu, guru juga masih terbebani dengan adanya tuntutan administrasi dari sekolah. Tuntutan administrasi sekolah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus antara lain, beban pengumpulan data yang diperlukan untuk prosedur penilaian fungsional, administrasi untuk pendanaan, laporan untuk guru khusus, dan laporan pelayanan yang diberikan (Folin, 1997). Beban yang dirasakan itulah yang menyebabkan ketidaksanggupan guru untuk memasukkan siswa berkebutuhan khusus di kelas mereka.

Faktor lain ialah kurangnya pemahaman dan kemampuan dari guru non-kekhususan, masalah kurikulum, cara pandang masyarakat yang keliru terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga menyebabkan adanya sikap yang kurang berkenan seperti pemberian stigma negatif bahkan menganggap individu penyandang disabilitas dengan *‘something negative, bad, incomplete, problematic, ‘stamp’ in life* (Sari & Hendriani, 2021). Serta tidak tersedianya fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanyalah sekadar kebijakan saja karena tidak ada praktik yang cukup berarti untuk membuat individu dengan disabilitas dapat berfungsi dan produktif seperti orang normal lainnya (Genova, 2015). Dan permasalahan paling penting ialah guru tidak dibekali pemahaman dan kompetensi yang diperlukan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus dikarenakan kurangnya pelatihan atau kurang efektifnya pelatihan kepada guru di sekolah inklusi. Pelatihan yang diberikan hanya berupa formalitas sebagai bukti tanpa melihat efektifitas dan perbaikan yang dihasilkan setelah pelatihan diberikan (Abongdia et al., 2015).

Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peranan yang besar, baik dalam pengambilan keputusan untuk pendidikan sampai pada dukungan kepada anak. Dukungan orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam berbagai bentuk termasuk mengasuh di dalam rumah, menciptakan situasi yang aman dan stabil, dan model pengasuhan yang tepat. Seorang anak berkebutuhan khusus dapat mencapai potensinya

secara maksimal apabila mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Dukungan dari ibu dapat memunculkan perasaan berharga pada anak, sementara dukungan dari ayah dapat mengembangkan kompetensi anak (Danielsen, 2009). Selain orang tua tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan anak berkebutuhan khusus adalah masyarakat. Penerimaan orang tua dan Masyarakat terhadap kondisi anak akan mempengaruhi sikap mereka kepada anak. lingkungan yang mampu menerima ketunaan anaknya, akan berusaha mencari jalan untuk mengurangipengaruh ketunaan tersebut dan mendorong pembelajaran anak semaksimal mungkin. Sebaliknya lingkungan yang belum bisa menerima kondisi anak akan cenderung merasa malu dan kurang terbuka terhadap perkembangan anak. Pada kenyataannya masih banyak orang tua yang enggan memasukkan anak dengan kebutuhan khusus ke sekolah reguler dengan alasan khawatir akan mendapat penolakan atau diskriminasi. Begitu juga dengan masyarakat yang masih menunjukkan sikap kurang peduli dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusi.

Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, menyebutkan terdapat delapan komponen yang harus mendapat perhatian dari pemangku kepentingan (stakeholders) sekolah inklusif yang meliputi 1) peserta didik; 2) kurikulum; 3) tenaga pendidik; 4) kegiatan pembelajaran; 5) penilaian dan sertifikasi; 6) manajemen sekolah; 7) penghargaan dan sanksi; dan 8) pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendidik sebagaimana yang tercantum dalam poin ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Selain guru kelas dan guru mata pelajaran, tenaga pendidik dalam pendidikan inklusi juga mencakup guru pembimbing khusus. Artinya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus yang bertugas untuk memberikan pendampingan baik berupa bimbingan, advokasi, atau konsultasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (Kustawan, 2016). Artinya, tugas guru pembimbing khusus adalah berkolaborasi dan menjalin kerja sama dengan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus mulai dari mengidentifikasi, melakukan asesmen, sampai menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut.

Strategi Implementasinya

Booth & Ainscow, (2002) menyatakan *Index for Inclusion* merupakan suatu sumber informasi untuk mendukung pengembangan pendidikan inklusi yang berprinsip guna mengembangkan sekolah dan meletakkan nilai-nilai inklusi dalam pelaksanaannya. Pengertian inklusi dalam indeks ini bukan hanya terbatas pada ABK, namun mengacu pada prinsip pendidikan untuk semua. Adapun prinsip-prinsip panduan strategi yang perlu diperhatikan dalam implementasi pendidikan inklusi meliputi 1) kesetaraan, mempunyai makna partisipasi yang setara dalam pendidikan dengan mengatasi perbedaan yang disebabkan oleh dampak hambatan sosial yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh disabilitas dan/atau kesulitan dalam pembangunan, 2) relevansi, artinya

pendidikan yang diselaraskan dengan karakteristik individu, kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam Pendidikan berpartisipasi secara setara dengan teman sebayanya, melalui layanan yang memadai dan tepat sasaran di masyarakat setempat. 3) akses, efektivitas, strategi yang digunakan efektif dalam meningkatkan prestasi dan partisipasi anak, meningkatkan penghapusan prasangka dan kepercayaan stereotip dalam proses pengajaran, hubungan siswa-guru dan kondisi kerja di sekolah, 4) efisiensi. maksudnya pengembangan individu dan komunitas yang menghargai keragaman.

Beberapa upaya guru dalam memahami Pendidikan inklusi;

1) Peningkatan kualitas *in-service training* (INSET) juga sangat penting untuk guru pendidikan inklusi, *awareness programmes*, *school-based professional development programmes*, *family support*, (Sari & Hendriani, 2021). Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan serta pembelajaran inklusi yang baik diperlukan partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Guru adalah faktor penggerak utama dalam proses pendidikan inklusi. Oleh karena itu, tanpa kerja sama dan bantuan dari perangkat sekolah lainnya, maka pelaksanaan pendidikan inklusi tidak dapat berjalan optimal (Tarnoto, 2016; Rusmono, 2020). Penting bagi guru untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengelola kelas dengan siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda.

2) Pelatihan *co-teaching*, yaitu guru dapat berbagi informasi mengenai pembelajaran dengan dengan siswa di kelas, mengurangi beban guru di kelas karena pembelajaran dilakukan oleh dua guru, dan memberikan pengalaman lebih dalam mengajar. Jika guru yang mengajar dapat bekerjasama dengan baik, maka beban mengajar yang dirasakan akan berkurang (Hamdan et al., 2016). Selain pelatihan mengenai *co-teaching*, guru juga dapat mengikuti pelatihan LIRP (lingkungan inklusi ramah pembelajaran) ialah mewujudkan sekolah yang ramah pembelajaran dengan cara melakukan refleksi pada beberapa modul yang telah disediakan. Setelah mendapatkan pelatihan tersebut guru dapat menumbuhkan pengetahuan bagaimana cara mengajar anak dengan latar belakang yang beragam, membangun pengetahuan bagaimana siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler belajar, dan juga dapat melihat celah untuk dapat mengembangkan sikap positif (Agung et al., 2017).

3) Perlunya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Banyak guru atau dokter khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana guru berkolaborasi dengan yang lain? Guru dikenal karena memiliki kemampuan untuk mengontrol kelas mereka sendiri. Kehadiran atau keberadaan guru lain di dalam kelas merupakan masalah baru bagi beberapa guru (Chandler, 2000). Beberapa guru tidak mau menghabiskan waktu untuk berkolaborasi dalam mengembangkan program inklusi, ketidakcocokan antara guru kelas dan guru pendamping berdampak pada pelayanan yang diberikan. Selain itu juga Segi sosialnya orang tua dan masyarakat sekitar juga perlu sadar bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan bantuan dan dukungan yang lebih dari anak sebaya pada umumnya. Orang tua juga perlu melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan sosial untuk mengasah keterampilan sosialnya. Dengan cara anak dapat diikutsertakan pada kegiatan

di masyarakat yang tidak terlalu menuntut secara sosial. Partisipasi anak dalam kegiatan masyarakat juga akan memengaruhi bagaimana dirinya berpartisipasi di kelas dalam pembelajaran. Dengan berpartisipasi di kelas, juga akan meningkatkan kesadaran teman sekelasnya bahwa terdapat siswa yang spesial dan memerlukan penanganan khusus dalam pembelajaran (Rusmono, 2020). Solusi penerapan pendidikan inklusi yaitu dengan melibatkan kepala sekolah, guru pendamping kelas, perhatian orang tua murid, maka pengelolaan dapat lebih optimal dan berdaya guna, efektif serta efisien (Ikramullah, & Sirojuddin, 2020).

PENUTUP

Beberapa sekolah sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusi. diantaranya, 1) tantangan sosial emosional; 2) tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan; 3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam setting inklusif 4) keterbatasan sarana dan prasarana, 5) Beban administrasi dan modifikasi kurikulum, 6) Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Terlepas dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya, program pendidikan inklusi masih perlu penguatan pada beberapa aspek tidak terkecuali peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sebagai Solusinya ada beberapa aspek 1) Peningkatan kualitas in-service training (INSET) juga sangat penting untuk guru pendidikan inklusi, awareness programmes, school-based professional development programmes, family support, (Sari & Hendriani, 2021); 2) Pelatihan co-teaching, yaitu guru dapat berbagi informasi mengenai pembelajaran dengan dengan siswa di kelas, mengurangi beban guru di kelas karena pembelajaran dilakukan oleh dua guru, dan memberikan pengalaman lebih dalam mengajar. Jika guru yang mengajar dapat bekerjasama dengan baik, maka beban mengajar yang dirasakan akan berkurang (Hamdan et al., 2016).) 3) Perlunya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 1999. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta : Rineka Cipta
- Adinugraha, A. Hamdan. 2016. Evaluasi Pertumbuhan Sambungan Eucalyptus pellita F. Muell dengan Teknik Veneer Grafting. Jurnal Sylva Lestari Vol 4 No 3.
- Ajzen, I. (2005). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 50, h.179-211.
- Arif Fathurrahman, Sumardi, Adi E. Yusuf, Sutji Harijanto. “Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Melalui Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Teamwork.” Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 7 (2019): 844.
- Aryo Sunaryo 2009 Ornamen Nusantara Kajian Khusus tentang Ornamen indonesia : Dahara Prize Semarang
-

- Bandi Delfi. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu pengantar Dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: Relika Aditama.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education
- Center, Y., & Ward, J. (1987). Teachers' attitudes towards the integration of disable children into regular schools. *The Exceptional Child*, 34, pp 41-56.
- Chandler, L. K. (2000). A training and consultation model to reduce resistance and increase educator knowledge and skill in addressing challenging behaviours. *Special Education Perspectives*, 9(1), pp3- 13.
- Forlin, C., Jobling, A., & Carrol, A. (2001). Preservice teachers' discomfort levels toward people with disabilities. *The Journal of International Special Needs*
- Knapp, Peter & Watkins. (2005). *Genre, Text, Grammar. Technologies For Teaching and Assessing Writing*. Australia: University of New South Wales Press.
- Kustawan, Dedy. 2013. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta Timur: PT Luksima Metro Media.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sari, C.N. & Hendriani, W. (2021). Hambatan pendidikan inklusi dan bagaimana mengatasinya: Telah kritis sistematis dari berbagai negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 9, No. 1. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- UNESCO. (2005). *World decade of education for sustainable development*. Retrieved from [http:// www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/ed](http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/ed)
- Wardhani, IGAK dan Kuswaya Wihardit. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Wardhani, IGAK dan Kuswaya Wihardit. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Yusraini. (2013). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif. *Media Akademika*, Vol. 28, No. 1, Januari 2013, 27-40.